

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agropolitan berdasarkan asal katanya terdiri dari dua kata, yaitu Agro dan Politan. Kata Agro yang berarti pertanian dan Politan yang berarti kota, maka Agropolitan berdasarkan asal katanya berarti kota pertanian atau pertanian yang ada di kota. Agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik, dan menghela dalam kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (Baruwadi & Akib, 2017).

Sektor pertanian juga merupakan sumber modal utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Konsep pengembangan agropolitan pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di pedesaan, melalui agribisnis yang merupakan sistem keutuhan serta saling terkait di antara seluruh kegiatan ekonomi yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya, subsistem agribisnis hilir dan subsistem jasa penunjang agribisnis yang terkait langsung dengan pertanian (Churiyah, 2006).

Pengembangan agropolitan sangat diperlukan dalam mendukung agribisnis di masa mendatang yang dapat berperan sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Agropolitan diposisikan secara sinergis dalam sistem pengembangan wilayah. Pengembangan kawasan agropolitan bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan

pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing. Sasaran dalam pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan (Churiyah, 2006).

Konsep agropolitan saat ini merupakan paradigma pembangunan yang terintegrasi pada suatu wilayah yang berbasis sektor pertanian dalam pengertian *on-farm* dan *off-farm* serta segala penunjangnya. Kawasan agropolitan hendaknya mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi, lingkungan dan sosial dalam membentuk pertumbuhan ekonomi wilayah, kenaikan pendapatan, perbaikan distribusi pendapatan, peningkatan aliran komoditi barang, jasa dan modal, peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan, serta perbaikan fungsi dan efektifitas kelembagaan pemerintah ataupun sosial di dalam wilayah (Nugroho, 2008).

Agropolitan di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Dengan dasar kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia maka pembangunan agropolitan merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui

pengembangan sektor pertanian sebagai tumpuan kehidupan masyarakat pedesaan (Haris et al., 2024).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang agropolitan memerlukan peran penting dari Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah memberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada Pemerintah Pusat. Hal ini sangat berdampak positif apabila orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program serta memiliki analisis mengenai hal apa saja yang akan terjadi di kemudian hari (Safitri, 2016).

Mengenai otonomi daerah juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah tersebut dapat memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab (Safitri, 2016).

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus pemerintahan di tingkat daerah untuk melakukan pembangunan ataupun pengembangan dalam ruang lingkup daerah, hal ini didukung dengan adanya otonomi daerah. Maka dengan adanya otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya potensi tersebut dapat dijadikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (Ristanti, 2017).

Sektor pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal. Konsep pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada kapasitas lokal dengan prinsip utama di dalam pengembangan ekonomi lokal adalah kerjasama melalui Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang dapat menjadi penentu keberhasilan dalam keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal dalam suatu daerah (Susanti et al., 2013).

Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan kerja sama yang dilakukan mulai dari pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat dan masyarakat lokal untuk memanfaatkan secara maksimal sumber daya dalam upaya mendukung upaya mendukung perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Kata kunci yang dapat diambil dalam pengembangan ekonomi lokal adalah kerjasama antara semua pihak, dan pemanfaatan sumber daya lokal secara maksimal (Sishadiyati & Wahed, 2020).

Ketertarikan Peneliti tentang pengembangan Agropolitan dalam Perspektif Local Economic Resources Development di Kabupaten Sumenep melihat adanya

potensi yang dimiliki salah satu daerah yang ada di Sumenep, yaitu bawang merah, sektor pertanian ini dapat mendukung perekonomian masyarakat lokal melalui pengembangan agropolitan dengan komoditas unggulannya yaitu bawang merah.

Bawang merah yang ada di Rubaru merupakan komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Sumenep dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui pengembangan agropolitan, bawang merah yang ada di Rubaru tidak hanya dapat mendorong aktivitas ekonomi dalam sektor pertanian namun juga bawang merah ini mengandung manfaat bagi kesehatan yang memiliki nutrisi dan rendah kalori sebagai vitamin, merial, antioksidan dan juga memiliki aroma yang tajam (Haris, 2022).

Gambar 1. 1
Bawang Merah Kecamatan Rubaru



Sumber : Balai Penyuluh Pertanian Rubaru

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan

pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan agrobisnis.

Dinamika dalam pengembangan agropolitan tidak lepas dari peran pemerintah yang ada di Kabupaten Sumenep. Yaitu Badan Perencanaan Daerah sebagai koordinator, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berperan secara teknis, Dinas PU Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air dan Disperindag sebagai pendukung dalam pengembangan agropolitan (Haris, 2022)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep yang berperan secara teknis dalam pengembangan agropolitan juga memberikan binaan dan penyuluhan di Kecamatan Rubaru yang berupa Balai Penyuluhan Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang pertanian pada tingkat Kecamatan yang berfungsi sebagai pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep (Hidayat et al., 2023).

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 atau Permentan /OT.140/4/3012 tentang tugas pokok Balai Penyuluhan Pertanian. Pertama, menyusun program penyuluhan, kedua, melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan, ketiga, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar, keempat, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, kelima, melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui

pencontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha (Hidayat et al., 2023)

Kelembagaan yang membidangi kegiatan pertanian di Kecamatan Rubaru terdiri atas Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kelompok tani yang ada di Kecamatan Rubaru berjumlah 359 kelompok tani tersebar di seluruh desa. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Rubaru berjumlah 11 kelompok yang terdapat di setiap desa, untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terdapat di Kecamatan Rubaru ada 1 yaitu PT. Permata Indah Rubaru yang memiliki gudang dan unit kerja pengolahan bawang merah yang berlokasi di desa Mandala (Hidayat et al., 2023)

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Rubaru memiliki berbagai kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian lapangan seperti pembinaan dan pengembangan Kelompok Tani kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap (PKS) petani, dan dilaksanakan dengan berbagai metode penyuluhan seperti anjungsana perorangan/kelompok/massa, demplot, uji teknologi dan berbagai metode penyuluhan lainnya, dalam melaksanakan kegiatannya Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rubaru sering bekerja sama dengan berbagai instansi ataupun pihak lain baik di Kecamatan Rubaru, Kabupaten maupun dari luar Sumenep (Hidayat et al., 2023)

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan agropolitan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pengembangannya menurut Kabid penyuluhan yaitu masih rendahnya kualitas SDM petani dan juga membutuhkan akses pasar yang belum efektif sehingga mempengaruhi pengembangan agropolttan yang juga masih menjadi permasalahan yang berupaya untuk diatasi, dan Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di Kecamatan rubaru yang menjadi kendala menurut salah satu penyuluh pertanian lapangan yaitu akses pasar yang dari segi harga produk pada tingkat petani yang masih belum stabil dan cenderung murah akibat alur pasar yang panjang dari petani ke tengkulak kecil kemudian dari tengkulak kecil ke pengepul besar, pengepul besar ke penjual eceran dan kemudian baru sampai pada konsumen. Di sisi lain juga masih banyaknya petani yang menggunakan pupuk kimia berlebihan yang dapat membuat tanah menjadi asam dan mengurangi tingkat produksi pada lahan.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti mengenai realita yang terjadi, maka peneliti bertujuan melakukan penelitian secara mendalam mengenai pengembangan sumber daya ekonomi lokal yang merupakan kegiatan penting dan melibatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menjadi potensi untuk dijadikan pendorong dalam bidang ekonomi. Pemerintah dan masyarakat dan dunia usaha yang saling bekerja sama untuk mengoptimalkan pengembangan sumber daya ekonomi lokal.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi dan juga berupaya untuk diatasi peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “pengembangan Agropolitan

Dalam Perspektif *Local Economic Resources Development* di Kabupaten Sumenep”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang disamapaikan dalam latar belakang terkait permasalahan dalam pengembangan bawang merah ditingkat lokal, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pengembangan Agropolitan Dalam Perspektif *Local Economic Resources Development* di Kabupaten Sumenep?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Pengembangan Agropolitan dalam Perspektif *Local Economic Resources Development* di Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan penelitian yang terus berkembang, serta memberikan sumbangan ilmiah dalam studi administrasi public sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang agropolitan dalam perspektif *local economic resources development* khususnya di kabupaten sumenep

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yang pertama peneliti dapat menerapkan dan melatih ilmu dan pengetahuan yang ditempuh selama perkuliahan, dan dapat menambah wawasan secara langsung bagi peneliti mengenai kajian studi administrasi public terkait pengembangan agropolitan dalam perspektif local economic resources development di Kabupaten Sumenep. Yang kedua dapat memeberikan manfaat berupa informasi bagi masyarakat khususnya di kabupaten Sumenep yaitu siswa, mahasiswa dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep. Yang ketiga yaitu diharapkn dari penelitian ini dapat memberikan saran terhadap pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu pihak yang terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah penelitian, sistematika penulisan dalam penelitian ini menunjukkan susunan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti mengurakain susunan penulisan serta pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan pada tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengembangan Agropolitan Dalam Perspektif *Local Economic Resources Development*” (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu, yang dapat dijadikan pembelajaran oleh peneliti sehingga dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya, dan pada Bab ini juga berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas dan melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrument data, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data. Pada Bab ini menggambarkan bagaimana cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada Bab ini peneliti mendeskripsikan tentang gambaran umum terkait objek yang diteliti yang berupa lokasi, struktur organisasi, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi. Pada bab ini peneliti menggambarkan dan menguraikan secara umum terkait objek penelitian.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang didapatkan baik dari hasil wawancara dan dikumen-dokumen lainnya, dan berlanjut pada pembahasan dimana peneliti menyajikan diskusi empiris yang mempertemukan antara data dan dilapangan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran sebagai implikasi dalam ilmu dan pengetahuan sebagai bab terakhir maka peneliti memberikan sumbangsih ilmu dan pengetahuannya sebagai bentuk pemahaman dari peneliti terkait teori dan data dilapangan yang didapat oleh peneliti

